



GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG  
NOMOR: 100.3.3.1/37 /III/2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR NOMOR: 188.44/25/III/2025  
TENTANG PERENCANAAN PENYUSUNAN PERATURAN GUBERNUR  
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2025

GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

- Menimbang** : bahwa mempedomani ketentuan Pasal 19 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Nomor: 188.44/25/III/2025 tentang Perencanaan Penyusunan Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2025;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan** :  
**KESATU** : Mengubah Keputusan Gubernur Nomor: 188.44/25/III/2025 tentang Perencanaan Penyusunan Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2025.
- KEDUA** : Perubahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, yakni mengubah daftar perencanaan penyusunan Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2025, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KETIGA** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pangkalpinang  
pada tanggal 28 Agustus 2025



Tembusan disampaikan Kepada Yth.:

1. Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Pangkalpinang;
2. Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri RI di Jakarta;
3. Plt. Inspektur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Pangkalpinang.

PERENCANAAN PENYUSUNAN  
 PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2025

NO	JUDUL/TENTANG	KETERANGAN
1.	Strategi Promosi Penanaman Modal	Baru
2.	Pedoman dan Tata Cara Promosi Penanaman Modal	Baru
3.	Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko	Baru
4.	Pelaksanaan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial	Baru
5.	Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Bagi Penyandang Disabilitas	Baru
6.	Sekolah Siaga Kependudukan	Baru
7.	Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 12 Tahun 2020 tentang Tata Kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Perubahan
8.	Pengembangan Provinsi Digital	Baru
9.	Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah	Baru
10.	Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2024	Baru
11.	Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Pajak Alat Berat	Baru
12.	Tata Cara atau Mekanisme Pemungutan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	Baru
13.	Penetapan Capaian Target Tahapan Atas Pendapatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Baru
14.	Rencana Induk Sistem Pengelolaan Air Minum	Baru
15.	Rencana Induk Sistem Pengelolaan Air Limbah	Baru

16.	Kebijakan Strategi Daerah Sistem Penyediaan Air Minum	Baru
17.	Road Map Sanitasi Provinsi	Baru
18.	Pakaian Dinas	Perubahan
19.	Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai ASN	Perubahan
20.	Manajemen Talenta	Perubahan
21.	Analisa Jabatan dan Analisa beban Kerja	Perubahan
22.	Tarif Layanan dan Non Pelayanan BLUD RSUP	Perubahan
23.	Tarif Layanan dan Non Pelayanan BLUD RSJD	Perubahan
24.	Tata Kelola Perdagangan Lada	Perubahan
25.	Tata Kelola Perkebunan Kelapa Sawit	Baru
26.	Penyelenggaraan ketenagakerjaan	Perubahan
27.	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Perubahan
28.	Pengelolaan Sumber Daya kelautan dan Perikanan	Perubahan
29.	Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Perizinan Non Berusaha	Perubahan
30.	Kelas Jabatan dan Nilai Jabatan	Perubahan
31.	Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Nomor 12 Tahun 2021 tentang SOTK UPTD	Perubahan
32.	Pelaksanaan Grand Design Pembangunan Kependudukan Tahun 2024-2028	Baru
33.	Lisensi Arsitektur	Baru
34.	Pelaksanaan RPJMD	Baru
35.	Pelaksanaan TPA Sampah Regional	Baru
36.	Penggunaan Pakaian Adat Bangka Belitung	Baru
37.	Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Baru
38.	Jadwal Retensi Arsip Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Baru
39.	Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Baru

40.	Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Baru
41.	Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Cabang Dinas Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Perubahan
42.	Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Perubahan
43.	Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Baru
44.	Kelas Jabatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Perubahan
45.	Kebutuhan Jabatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Perubahan
46.	Standar Kompetensi Jabatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Perubahan
47.	Penilaian Kinerja Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Baru
48.	Road Map Reformasi Birokrasi	Perubahan
49.	Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Perubahan
50.	Tata Naskah Dinas Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Baru
51.	Kode Klasifikasi Arsip di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Baru
52.	Pedoman Penerimaan Murid Baru Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan	Pencabutan
53.	Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 35 Tahun 2009 tentang Eliminasi Malaria di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Perubahan
54.	Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 12 Tahun 2020 tentang Tata Kelola Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik	Perubahan
55.	Pengembangan Provinsi Digital	Baru
56.	Pembelian Tandan Buah Segar Kelapa Sawit Produksi Pekebun Mitra	Baru

57.	Kebijakan dan Strategi Daerah Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (Jakstrada SPALD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Baru
58.	Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum (RISPAM) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Baru
59.	Peta Jalan Pembangunan Kependudukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Baru

